

REPRODUKSI KEKUASAAN MELALUI KEKERASAN SIMBOLIK DALAM SISTEM PENDIDIKAN: ANALISIS KRITIS PEMIKIRAN PIERRE BOURDIEU

THE REPRODUCTION OF POWER THROUGH SYMBOLIC VIOLENCE IN THE EDUCATION SYSTEM: A CRITICAL ANALYSIS OF PIERRE BOURDIEU'S THOUGHT

Gede Agus Siswadi

Sekolah Tinggi Hindu Dharma Klaten Jawa Tengah, Mahasiswa Program Doktor Fakultas
Filsafat Universitas Gadjah Mada

Email: gedeagussiswadi@sth-d-jateng.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini menggali fenomena reproduksi kekuasaan melalui kekerasan simbolik dalam sistem pendidikan, dengan fokus pada perspektif teori sosial Pierre Bourdieu. Melalui pendekatan sosiologisnya, Bourdieu menyoroti bagaimana kekuasaan dipertahankan dan diteruskan melalui praktik-praktik simbolik dalam dunia pendidikan. Penelitian ini menganalisis bagaimana pertarungan simbolik antara kelompok yang memegang kapital budaya yang dominan dengan kelompok yang memiliki kapital budaya yang lebih rendah dalam menciptakan ketidaksetaraan dalam kesempatan pendidikan. Pergulatan simbolik ini dapat terlihat dalam berbagai aspek, termasuk kurikulum, penilaian, dan norma-norma sosial di lingkungan pendidikan. Melalui pemahaman Bourdieu tentang konsep habitus, kapital budaya, dan lapangan sosial, penelitian ini merinci bagaimana reproduksi kekuasaan terjadi secara tersembunyi melalui mekanisme simbolik, seperti bahasa, gaya berpakaian, dan nilai-nilai budaya tertentu yang diterapkan dalam konteks pendidikan. Temuan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang ketidaksetaraan sistemik dalam pendidikan dan menyoroti pentingnya memahami dan mengatasi kekerasan simbolik sebagai langkah awal menuju transformasi sosial yang lebih adil di bidang pendidikan.

Kata Kunci: *Reproduksi Kekuasaan, Kekerasan Simbolik, Pierre Bourdieu*

ABSTRACT

This research explores the phenomenon of power reproduction through symbolic violence in the education system, focusing on Pierre Bourdieu's social theory perspective. Through his sociological approach, Bourdieu highlights how power is maintained and continued through symbolic practices in education. This research analyses how symbolic struggles between groups holding dominant cultural capital and groups with lower cultural capital create inequality in educational opportunities. This symbolic struggle can be seen in various aspects, including curriculum, assessment, and social norms in the educational environment. Through Bourdieu's understanding of the concepts of habitus, cultural capital and social field, this research details how the reproduction of power occurs covertly through symbolic mechanisms, such as language, style of dress and certain cultural values applied in educational contexts. The findings of this study can provide deep insights into systemic

inequalities in education and highlight the importance of understanding and addressing symbolic violence as a first step towards more equitable social transformation in the field of education.

Keywords: *Power Reproduction, Symbolic Violence, Pierre Bourdieu*

I. PENDAHULUAN

Pendidikan memainkan peran sentral dalam membentuk peradaban masyarakat yang maju dan berkelanjutan. Di tengah arus zaman yang terus berubah, peran pendidikan menjadi fondasi bagi perkembangan masyarakat. Pendidikan memberikan akses dengan pengetahuan, menggerakkan individu dari ketidaktahuan menuju pemahaman yang lebih mendalam tentang dunia di sekitarnya (Siswadi, 2023). Hal ini tentunya akan dapat menciptakan dasar yang kuat bagi inovasi, perkembangan teknologi, dan kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan. Selain itu, pendidikan juga memainkan peran penting dalam membentuk karakter dan moral individu. Melalui pendidikan, nilai-nilai seperti toleransi, empati, dan tanggung jawab sosial dapat ditanamkan pada generasi mendatang. Hal ini membentuk dasar etika yang kuat dan dapat memperkokoh jaringan sosial dalam masyarakat.

Pendidikan juga merupakan kunci dalam mengurangi kesenjangan sosial (Mansyur, 2014). Dengan memberikan akses yang sama terhadap pengetahuan dan kesempatan, pendidikan dapat menjadi alat yang kuat untuk mengatasi disparitas ekonomi dan sosial dalam masyarakat (Harisuddin, 1981). Hal ini juga akan memberikan peluang yang lebih luas bagi individu dari berbagai latar belakang untuk berkembang dan berkontribusi pada masyarakat secara positif. Tidak hanya itu, pendidikan juga mendorong perubahan sosial yang berkelanjutan. Melalui pengetahuan, individu didorong untuk berpikir kritis, menghadapi tantangan global, dan mengembangkan solusi inovatif terhadap masalah yang dihadapi masyarakat (Siswadi, 2022a). Hal ini akan dapat membentuk landasan untuk membangun masyarakat yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan adaptif terhadap perubahan.

Pendidikan, sebagai fondasi pembentukan masyarakat, tidak hanya menjadi cermin nilai-nilai universal yang dihormati, tetapi juga menciptakan panggung di mana kekuasaan bisa dipertahankan atau diperoleh melalui bentuk yang lebih halus dan seringkali tidak terlihat (Siswadi, 2022b). Dalam perjalanan menuju pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika sistem pendidikan, konsep kekerasan simbolik oleh Pierre Bourdieu muncul sebagai lensa kritis yang dapat melihat bagaimana norma, nilai, dan simbol tidak hanya menjadi sarana untuk mendidik, tetapi juga dapat menjadi instrumen untuk mempertahankan dan memperkuat struktur kekuasaan yang ada (Martono, 2012).

Berdasarkan pandangan Pierre Bourdieu, kekerasan simbolik di sekolah dapat termanifestasikan dalam berbagai bentuk. Kekerasan simbolik ini dapat terjadi melalui dominasi patriarki yang menempatkan perempuan sebagai objek seksual dan membungkam suara perempuan (Siswadi, 2022c). Selain itu, kekerasan simbolik juga dapat terjadi melalui bentuk-bentuk verbal seperti ucapan yang menyakiti, memaksa, dan menginterogasi (Putri, 2019). Bentuk kekerasan simbolik juga dapat muncul dalam film, di mana kekerasan simbolik dapat terwujud dalam bentuk bahasa, eufemisme, dan mekanisme sensorisasi. Selain itu, kekerasan simbolik juga dapat terjadi melalui kekerasan non-fisik (verbal) seperti memaki, menghina, dan menjuluki (Retnosari, 2019).

Kekerasan simbolik, dalam terminologi Bourdieu, tidak hanya melibatkan ancaman fisik atau paksaan langsung. Sebaliknya, kekerasan simbolik mengacu pada penggunaan simbol, representasi, dan norma sebagai alat untuk menyaring, memperkuat, atau bahkan menyingkirkan suara dan identitas yang dianggap tidak sesuai dengan norma yang ditetapkan. Dengan kata lain, melalui bahasa, simbol, dan norma, kekerasan simbolik menciptakan ketidaksetaraan yang tersembunyi, memberikan keuntungan kepada kelompok tertentu dan

memarginalkan yang lain dalam arena pendidikan. Sejak awal, institusi pendidikan diharapkan menjadi ruang bagi semua individu untuk dapat meraih potensinya dengan adil dan merata. Namun, kenyataannya, pendidikan sering menjadi medan tempur tersembunyi di mana kekuatan dan *privilege* tertentu dijaga dan diperkuat. Kekerasan simbolik dapat terjadi melalui interaksi antara guru dan siswa, di mana kekuasaan dan dominasi dapat memengaruhi dinamika hubungan di lingkungan pendidikan (Rosmawati et al., 2021). Selain itu, kekerasan simbolik juga dapat termanifestasi dalam bentuk perlakuan verbal, seperti hinaan, ejekan, atau penilaian yang merendahkan martabat siswa. Hal ini dapat memengaruhi psikologis siswa dan menciptakan lingkungan belajar yang tidak aman. Selain itu, kekerasan simbolik juga dapat terjadi melalui penerapan aturan dan sanksi yang tidak adil, yang dapat menimbulkan ketidakadilan dan ketidaksetaraan di lingkungan pendidikan (Putri, 2018a). Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada penelusuran bentuk-bentuk kekerasan simbolik dalam pendidikan, dengan menggunakan pemikiran dari Pierre Bourdieu. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan wawasan serta renungan filosofis yang komprehensif berkaitan dengan praktik-praktik kekerasan simbolik yang terjadi dalam sistem pendidikan.

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan hermeneutik filosofis. Objek material dalam penelitian ini mengenai reproduksi kekuasaan sebagai sebuah fenomena yang terjadi dalam sistem pendidikan, sedangkan objek formal dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan pokok pemikiran dari Pierre Bourdieu terkait dengan kekerasan simbolik dalam pendidikan. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan (library research) yakni melalui penelusuran, pembacaan, pencatatan serta telaah dokumen ataupun berbagai karya ilmiah lainnya seperti buku, artikel, serta dokumen lain yang memiliki relevansi dengan penelitian ini. Sedangkan analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan mengikuti pola analisis dari Miles dan Huberman yakni melalui data koleksi, reduksi data, display data, dan penyimpulan data yang telah dianalisis tersebut.

II. PEMBAHASAN

1 Biografi Pierre Bourdieu dan Pokok-Pokok Pemikirannya

Pierre Felix Bourdieu, lahir pada 1 Agustus 1930, di desa kecil Denguin, Pyrenees Atlantiques, Prancis, merupakan seorang sosiolog Prancis yang memiliki pengaruh besar dalam kajian teori sosial dan antropologi budaya. Bourdieu adalah anak kedua dari pasangan Félix Bourdieu dan Noémie Duhau, yang hidup sebagai petani. Latar belakang petani keluarganya memberikan Bourdieu wawasan yang kaya akan realitas kehidupan masyarakat pedesaan Prancis pada masa itu. Orang tua Bourdieu, terutama ayahnya, Félix Bourdieu, memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk nilai-nilai dan pandangan hidupnya. Keluarga Bourdieu hidup dari pekerjaan pertanian, dan ini memberikan Bourdieu pengalaman langsung dengan kehidupan di desa. Pengalaman ini membentuk pemahamannya tentang kerja keras, ketahanan, dan nilai-nilai tradisional yang terkait erat dengan kehidupan pedesaan.

Orang tua Bourdieu menghadapi keterbatasan ekonomi, yang menciptakan kesadaran tentang realitas ketidaksetaraan sosial. Kondisi finansial keluarganya memainkan peran penting dalam membentuk pemahaman Bourdieu tentang perbedaan kelas dan dampaknya terhadap kehidupan sehari-hari. Melalui interaksi dengan orang tuanya dan kehidupan di pedesaan, Bourdieu mulai mengembangkan pandangan kritis terhadap budaya dominan. Bourdieu melihat bagaimana budaya tertentu dianggap lebih tinggi dan elit, sementara budaya masyarakat pedesaan dianggap rendah dan terpinggirkan. Meskipun keluarganya menghadapi keterbatasan ekonomi, namun orang tua Bourdieu tidak pernah lelah demi anaknya dapat mengenyam pendidikan yang tinggi. Bakat intelektual Bourdieu terlihat

sejak dini, dan pendidikan dasarnya dimulai di Denguin. Kemudian jenjang pendidikan tingginya dilanjutkan di *École Normale Supérieure* di Paris, dan pada saat itu Bourdieu memusatkan studinya pada bidang filsafat.

Pada tahun 1955, Bourdieu diwajibkan menjalani dinas militer selama dua tahun selama Perang Aljazair. Pengalaman ini membuka matanya terhadap ketidaksetaraan dan konflik sosial. Pengalaman dinas militer selama Perang Aljazair pada tahun 1955 menjadi titik balik dalam pendidikannya. Pengalaman konflik sosial ini memotivasi pergeseran minat Bourdieu dari filsafat ke sosiologi, dan pada tahun 1958, Bourdieu meraih gelar doktor dalam bidang sosiologi. Karier akademisnya dimulai sebagai dosen di Universitas Algiers, dan setelah kembali ke Prancis, Bourdieu menjadi profesor sosiologi di Universitas Paris-Nanterre. Selama hidupnya, Bourdieu cukup produktif dalam menulis dan berkarya. Hal ini dibuktikan dengan beberapa karya-karya dari Bourdieu yang sangat berpengaruh dalam dunia sosiologi maupun filsafat.

Pierre Bourdieu menikah dengan Marie-Claire Brizard pada tahun 1962. Marie-Claire Brizard juga seorang ilmuwan sosial yang memiliki ketertarikan pada bidang sosiologi. pernikahannya tidak hanya membentuk hubungan pribadi yang kokoh, tetapi juga merupakan kemitraan intelektual yang kuat. Keduanya tidak hanya berbagi cinta, tetapi juga kegemaran terhadap penelitian dan pemikiran kritis. Hubungan ini memberikan kontribusi besar terhadap karyanya masing-masing. Dalam karya-karyanya, terlihat pengaruh dan kolaborasi antara Bourdieu dan Marie-Claire Brizard. Warisan karya-karya Bourdieu dan peran Marie-Claire Brizard dalam perjalanan intelektualnya membuktikan bahwa hubungan pribadi dan intelektual dapat saling melengkapi dan memperkuat.

Karya dari Bourdieu yang berjudul *“Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste”* yang diterbitkan pada tahun 1979 merupakan salah satu karyanya yang paling terkenal dan berpengaruh. Bourdieu menyelidiki bagaimana selera dan preferensi estetis berhubungan dengan struktur kelas sosial. Selain itu Bourdieu mengungkapkan bagaimana budaya kapital memainkan peran kunci dalam membentuk selera individu dan menyumbang pada reproduksi ketidaksetaraan sosial. Selanjutnya karya dengan judul *“Outline of a Theory of Practice”* yang diterbitkan pada tahun 1972, dalam karya ini, Bourdieu mengembangkan konsep *“habitus”* dan *“field”*. Bourdieu memperkenalkan gagasan bahwa perilaku sosial tidak hanya dipengaruhi oleh struktur sosial eksternal, tetapi juga oleh struktur mental internal yang disebut sebagai habitus. Karya ini menjadi dasar bagi pemahaman Bourdieu tentang reproduksi sosial (Yuliantoro, 2016).

Selanjutnya adalah karyanya yang berjudul *“Symbolic Violence”* diterbitkan pada tahun 1976, dalam tulisan ini, Bourdieu memperkenalkan konsep kekerasan simbolik, yaitu kekuatan yang tersembunyi dalam praktik sosial dan simbolik yang dapat mempertahankan dan memperkuat ketidaksetaraan (Martono, 2012). Bourdieu membahas bagaimana kekuatan simbolik dapat diterapkan untuk mempertahankan struktur sosial yang ada. Berikutnya karya dengan judul *“Homo Academicus”* yang diterbitkan pada tahun 1984. Melalui buku ini, Bourdieu menyelidiki dunia akademis dan ilmu pengetahuan. Bourdieu memeriksa struktur sosial yang membentuk institusi pendidikan tinggi dan bagaimana kekuasaan dan kapital budaya beroperasi di dalamnya.

Kemudian karyanya yang berjudul *“The Social Structures of the Economy”* yang diterbitkan pada tahun 2000, karya ini menyajikan analisis mendalam tentang struktur ekonomi dan hubungannya dengan struktur sosial. Bourdieu menyelidiki bagaimana kapital ekonomi, budaya, dan sosial saling terkait, membentuk sebuah dominasi dan ketidaksetaraan dalam masyarakat. Selanjutnya karyanya yang berjudul *“Practical Reason: On the Theory of Action”* yang diterbitkan pada tahun 1998, dalam buku ini, Bourdieu membahas konsep rasionalitas praktis dan teori tindakan. Bourdieu menguraikan bagaimana habitus dan struktur sosial memainkan peran dalam membentuk pilihan dan

tindakan individu, memberikan kontribusi kepada pemahaman manusia tentang agensi dalam konteks struktural.

Berikutnya karya yang berjudul *“The Field of Cultural Production”* yang diterbitkan pada tahun 1993, dalam karya ini, Bourdieu menganalisis lapangan produksi budaya, termasuk seni, sastra, dan media. Bourdieu menggali dinamika kekuasaan dan struktur sosial dalam pembentukan karya seni serta bagaimana selera dan penilaian dalam bidang ini tercermin dalam kapital budaya. Selanjutnya karyanya dengan judul *“Language and Symbolic Power”* yang diterbitkan pada tahun 1991, bersama dengan John B. Thompson, Bourdieu mengeksplorasi hubungan antara bahasa dan kekuasaan simbolik. Karya ini menguraikan bagaimana penggunaan bahasa dapat membentuk hierarki sosial dan menyumbang pada reproduksi ketidaksetaraan. Kemudian karya selanjutnya berjudul *“Masculine Domination”* yang diterbitkan pada tahun 2001, dalam karya ini, Bourdieu bersama dengan seorang koleganya, mengeksplorasi konsep maskulinitas dan dominasi gender. Bourdieu membahas bagaimana struktur sosial dan habitus memainkan peran dalam menciptakan dan mempertahankan hierarki gender dalam masyarakat.

Konsep penting yang dijelaskan oleh Pierre Bourdieu yang pertama adalah konsep habitus. Habitus, dalam pandangan Pierre Bourdieu, merujuk pada sistem disposisi mental dan fisik yang membentuk pola perilaku dan pandangan dunia seseorang. Habitus terbentuk melalui interaksi dengan lingkungan sosial sepanjang hidup, habitus mencakup norma, nilai-nilai, dan kebiasaan yang memengaruhi cara individu merespon situasi, membuat keputusan, dan mempersepsikan dunia sekitarnya. Habitus tidak hanya sekadar respon eksternal terhadap struktur sosial, melainkan juga internalisasi norma dan nilai, menciptakan landasan mental bagi individu untuk beroperasi di dalam masyarakat. Selain itu, habitus juga memainkan peran dalam membentuk praktik sosial, mempengaruhi tindakan sehari-hari dan keputusan kolektif dalam masyarakat. Dengan demikian, konsep habitus memberikan kontribusi yang signifikan dalam pemahaman reproduksi sosial, dinamika kekuasaan, dan pola perilaku individu dalam masyarakat (Martono, 2012).

Selanjutnya, hal penting yang dijelaskan oleh Pierre Bourdieu adalah mengenai teori modalnya. Dalam teori modal Bourdieu, terdapat empat jenis modal yang memainkan peran kunci dalam membentuk struktur sosial dan ketidaksetaraan, yakni modal ekonomi, modal budaya, modal sosial, dan modal simbolik. Modal Ekonomi (*Economic Capital*) dalam pandangan Bourdieu mencakup sumber daya finansial dan materi yang dimiliki seseorang. Hal ini termasuk kekayaan, properti, dan akses terhadap sumber daya ekonomi lainnya. Modal ekonomi memberikan individu akses ke pendidikan, kesehatan, dan berbagai bentuk kapital budaya dan sosial. Dalam konteks ini, ketidaksetaraan ekonomi menjadi faktor penting dalam membentuk ketidaksetaraan sosial secara lebih luas.

Selanjutnya adalah Modal Budaya (*Cultural Capital*), modal budaya merujuk pada pengetahuan, keterampilan, dan keahlian yang dimiliki individu, baik yang diperoleh melalui pendidikan formal maupun pengalaman informasi dan kebudayaan. Modal budaya dapat terbagi menjadi tiga bentuk: modal inkorporasi (pengetahuan yang diperoleh melalui sosialisasi), modal objektivasi (hasil karya yang mencerminkan pengetahuan), dan modal inskripsi (kemampuan untuk mengartikulasikan dan mengkomunikasikan pengetahuan).

Berikutnya adalah Modal Sosial (*Social Capital*). Modal sosial melibatkan jaringan hubungan sosial dan interaksi yang dimiliki individu atau kelompok. Hal ini mencakup dukungan dari keluarga, teman, dan koneksi sosial lainnya yang dapat memberikan akses ke peluang dan sumber daya. Modal sosial dapat memberikan keuntungan dalam berbagai bidang, seperti pekerjaan, pendidikan, dan partisipasi dalam kegiatan sosial. Serta selanjutnya adalah Modal Simbolik (*Symbolic Capital*). Modal simbolik adalah bentuk pengakuan dan status yang dimiliki seseorang dalam masyarakat. Hal ini mencakup penghargaan, gelar, atau prestise yang diberikan oleh masyarakat terhadap individu atau

kelompok. Modal simbolik dapat memengaruhi bagaimana individu dilihat dan dihormati dalam berbagai konteks sosial, dan memiliki dampak pada mobilitas sosial.

2 Reproduksi Kekuasaan Melalui Kekerasan Simbolik dalam Sistem Pendidikan

Pandangan Pierre Bourdieu tentang reproduksi kekuasaan melalui kekerasan simbolik dalam sistem pendidikan menggambarkan suatu realitas yang kompleks dan tersembunyi di balik dinamika pendidikan formal. Bourdieu memperkenalkan konsep kekerasan simbolik untuk menjelaskan cara simbol-simbol, bahasa, dan norma atau nilai digunakan sebagai alat untuk mempertahankan ketidaksetaraan sosial dan memperkuat posisi tertentu dalam struktur masyarakat. Dalam pemikirannya, Bourdieu menyoroti bahwa kekerasan simbolik menciptakan dan mempertahankan pemahaman budaya tertentu yang dianggap “tinggi” atau “elitis”. Sistem pendidikan, sebagai salah satu lembaga utama dalam masyarakat, menjadi wadah untuk memajang dan mengukuhkan norma dan atau nilai yang memengaruhi pandangan dunia individu dan kelompok sosial (Martono, 2012).

Pierre Bourdieu menganggap bahasa sebagai salah satu alat utama kekuasaan yang memainkan peran sentral dalam proses reproduksi sosial. Dalam pandangannya, bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga sarana untuk mempertahankan dan memperkuat struktur sosial serta hirarki kekuasaan yang ada dalam masyarakat. Bahasa, dalam pemikiran Bourdieu, dapat digunakan untuk menciptakan distingsi sosial dan membedakan antara kelompok-kelompok sosial. Penggunaan bahasa tertentu, seperti dialek, aksen, atau istilah teknis, dapat menciptakan batasan sosial dan memperkuat ketidaksetaraan dalam masyarakat. Selanjutnya bagi Bourdieu, pendidikan menjadi arena khusus di mana bahasa berfungsi sebagai alat kekuasaan. Bourdieu menyoroti bahwa penggunaan bahasa dalam lingkungan pendidikan dapat menciptakan sekat-sekat yang memengaruhi kesempatan dan hasil pendidikan. Bahasa yang diakui dan diterima oleh lembaga pendidikan dapat memberikan keuntungan kepada kelompok sosial tertentu, sementara bahasa yang dianggap ‘lain’ dapat menciptakan hambatan bagi kelompok lainnya (Rosmawati et al., 2021).

Bahasa tidak hanya menciptakan batasan sosial, tetapi juga menentukan norma dan nilai dalam proses pendidikan. Penggunaan bahasa yang sesuai dengan norma sosial yang dominan dapat memberikan keuntungan kepada kelompok yang sudah terbiasa dengan kebudayaan yang diakui, sedangkan individu atau kelompok yang menggunakan bahasa yang berbeda mungkin dihadapkan pada tantangan yang cukup sulit dalam merespon tuntutan pendidikan formal. Penggunaan bahasa dalam konteks pendidikan juga terkait erat dengan modal kultural. Bourdieu menunjukkan bahwa individu atau kelompok sosial yang membawa modal kultural yang diakui dalam bahasa pendidikan formal akan lebih mudah beradaptasi dan sukses di dalam sistem tersebut. Oleh karenanya, dalam pandangan Bourdieu, bahasa bukan hanya sebagai medium komunikasi, melainkan sebagai instrumen kekuasaan yang dapat menciptakan, mempertahankan, atau menggoyahkan struktur sosial dan ketidaksetaraan dalam masyarakat.

Selanjutnya, Bourdieu menilai bahwa sistem pendidikan cenderung memberikan keunggulan kepada individu atau kelompok yang memiliki modal budaya yang sejalan dengan norma-norma dan nilai-nilai yang diakui oleh lembaga-lembaga tersebut (Widyastuti, 2020). Hal ini menciptakan kesenjangan antara kelompok sosial yang berbeda. Bourdieu juga menyoroti fenomena reproduksi sosial yang terjadi melalui pendidikan. Bourdieu berpendapat bahwa sistem pendidikan cenderung mempertahankan dan mentransmisikan ketidaksetaraan sosial dari satu generasi ke generasi berikutnya. Anak-anak dari lapisan sosial yang lebih tinggi cenderung memiliki akses lebih mudah ke pendidikan yang lebih baik, sementara anak-anak dari lapisan sosial yang lebih rendah menghadapi hambatan dalam mencapai kesempatan pendidikan yang setara (Freire, 1984).

Bourdieu juga mengemukakan konsep meritokrasi dalam sistem pendidikan. Meskipun sistem ini berusaha mempromosikan gagasan bahwa keberhasilan didasarkan pada bakat dan usaha individu, Bourdieu mengklaim bahwa itu seringkali hanya menciptakan ilusi meritokrasi. Bourdieu berpendapat bahwa keberhasilan dalam sistem pendidikan seringkali lebih dipengaruhi oleh latar belakang sosial dan ekonomi, bukan semata-mata kemampuan dan usaha individu. Selain itu, Bourdieu juga menyoroti dominasi budaya kelompok elit dalam kurikulum dan nilai-nilai yang diajarkan di sekolah. Bourdieu berpendapat bahwa lembaga-lembaga pendidikan lebih cenderung mempromosikan dan mengukuhkan budaya kelompok dominan, yang pada gilirannya mengesampingkan atau merendahkan nilai-nilai budaya kelompok minoritas.

Selanjutnya, dalam pandangan Pierre Bourdieu, kekerasan simbolik dalam kurikulum mencakup serangkaian bentuk yang dapat memperkuat dan mempertahankan ketidaksetaraan sosial. Kurikulum, sebagai medium untuk mentransmisikan nilai-nilai dan norma-norma budaya, seringkali memperkuat dominasi kelompok elit dalam masyarakat. Materi ajar yang lebih banyak mengakui dan menghargai budaya kelompok yang mendominasi dapat menciptakan kekerasan simbolik, merendahkan atau mengabaikan nilai-nilai budaya kelompok minoritas. Demikian juga materi ajar yang tidak mencerminkan kekayaan pengetahuan dan tradisi lokal dapat menciptakan kekerasan simbolik dengan mengesampingkan pengalaman hidup siswa dari latar belakang budaya yang berbeda.

Berikutnya, Bourdieu juga menjelaskan bagaimana sesungguhnya bentuk kekerasan simbolik yang terjadi di sekolah, dan hal tersebut dilakukan oleh guru. Kekerasan simbolik yang dilakukan oleh guru di sekolah merupakan fenomena serius yang memiliki dampak jangka panjang terhadap perkembangan psikologis dan emosional siswa (Apriyansyah, 2021). Salah satu bentuk kekerasan simbolik yang umum terjadi adalah perlakuan tidak adil dan diskriminatif terhadap siswa berdasarkan latar belakang sosial, ekonomi, atau suku bangsa. Guru yang menggunakan stereotip atau prasangka dapat menciptakan lingkungan belajar yang tidak aman dan tidak mendukung. Penilaian yang tidak objektif dan tidak adil dapat menjadi bentuk kekerasan simbolik, di mana siswa dihakimi berdasarkan asumsi dan preferensi personal guru, bukan berdasarkan pencapaian atau kemampuan sebenarnya. Hal ini dapat merugikan perkembangan akademis dan kepercayaan diri siswa (Fitriana, 2020).

Selanjutnya, penghukuman yang memalukan dan merendahkan martabat siswa juga merupakan contoh kekerasan simbolik. Guru yang menggunakan kata-kata atau tindakan yang merendahkan dapat menciptakan trauma psikologis yang sulit diatasi oleh siswa. Pemberian label negatif dan stereotip terhadap siswa dapat mengakibatkan persepsi diri yang rendah dan menghambat kemungkinan pencapaian yang lebih tinggi. Guru yang tidak menyadari dampak kata-kata yang mungkin tanpa disengaja merugikan proses pembelajaran siswa (Taufik & Ishak, 2017).

Berikutnya, Bourdieu juga menganggap bahwasanya bentuk penolakan atau pengabaian terhadap ide dan pendapat siswa juga bisa dianggap sebagai bentuk kekerasan simbolik. Guru yang tidak memberikan ruang untuk berpendapat dan menghargai keragaman pandangan dapat menghambat perkembangan intelektual dan kritisisme siswa. Selain itu, pilihan kurikulum dan metode pengajaran yang tidak inklusif juga dapat menjadi bentuk kekerasan simbolik, terutama jika hal tersebut mengabaikan keberagaman budaya dan kepentingan siswa. Guru yang tidak memahami keberagaman siswa mungkin secara tidak langsung mengecualikan sebagian besar dari pengalaman pembelajaran (Siswadi, 2022d).

Tekanan akademis yang berlebihan dan ekspektasi yang tidak realistis dari guru dapat memunculkan kekerasan simbolik. Guru yang terlalu fokus pada pencapaian tertentu mungkin tidak menyadari dampak mental dan emosional yang ditimbulkan pada siswa.

Keaktifan dalam perbandingan atau peringkat antar siswa juga dapat menciptakan lingkungan yang kompetitif dan tidak sehat. Selain itu, pengabaian terhadap isu-isu kesejahteraan mental siswa dapat dianggap sebagai bentuk kekerasan simbolik. Guru yang tidak responsif terhadap kebutuhan emosional siswa mungkin secara tidak langsung menunjukkan bahwa kesejahteraan psikologis tidak begitu penting. Selanjutnya, ketidaksetaraan dalam distribusi sumber daya dan perhatian dapat menciptakan kekerasan simbolik. Guru yang lebih memilih atau memberikan perhatian lebih kepada siswa tertentu dapat meninggalkan siswa lain merasa tidak dihargai dan tidak diperhatikan. Terakhir, ketidakadilan dalam penegakan aturan dan disiplin juga dapat dianggap sebagai bentuk kekerasan simbolik. Guru yang tidak konsisten atau tidak adil dalam menanggapi pelanggaran aturan dapat menciptakan ketidakamanan dan ketidakpastian di antara siswa.

3 Refleksi Pemikiran Pierre Bourdieu terhadap Sistem Pendidikan di Indonesia

Bentuk kekerasan simbolik di sekolah merupakan sebuah fenomena yang telah lama menjadi perhatian dalam pandangan Pierre Bourdieu. Kekerasan simbolik ini dapat termanifestasi dalam berbagai bentuk, seperti kekerasan simbolik dalam bentuk bahasa, eufemisme, dan mekanisme sensorisasi. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan simbolik tidak hanya terjadi dalam bentuk fisik dan psikis, tetapi juga melalui simbol-simbol yang digunakan dalam interaksi sosial di lingkungan sekolah. Selain itu, kekerasan simbolik juga dapat terjadi dalam bentuk verbal, seperti memaki, menghina, atau menjuluki, yang dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap korban. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa kekerasan simbolik di sekolah tidak hanya bersifat individual, tetapi juga terkait dengan struktur sosial dan budaya yang ada di lingkungan pendidikan (Putri, 2018b).

Bagi Bourdieu, kekerasan simbolik juga terkait dengan dominasi dan reproduksi nilai-nilai dalam masyarakat, seperti dalam kasus dominasi patriarki terhadap perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan simbolik di sekolah tidak dapat dipisahkan dari dinamika kekuasaan dan struktur sosial yang ada. Selain itu, kekerasan simbolik juga dapat terjadi melalui media dan budaya populer, seperti dalam sinetron, yang menampilkan dominasi dan pembungkaman terhadap perempuan. Dengan demikian, kekerasan simbolik di sekolah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika sosial dan budaya yang lebih luas. Dalam konteks ini, pemahaman terhadap kekerasan simbolik di sekolah menurut Bourdieu memerlukan pendekatan yang holistik, yang tidak hanya memperhatikan interaksi individual, tetapi juga struktur sosial, budaya, dan reproduksi nilai-nilai dalam masyarakat. Dengan demikian, upaya untuk mencegah dan mengatasi kekerasan simbolik di sekolah perlu melibatkan pemahaman yang mendalam terhadap dinamika sosial dan budaya yang ada, serta bagaimana kekuasaan dan nilai-nilai direproduksi dalam konteks pendidikan.

Pemikiran Bourdieu menjadi penting untuk menyoroti ketidaksetaraan dalam akses pendidikan di Indonesia. Faktor-faktor seperti latar belakang ekonomi dan budaya dapat memberikan keuntungan atau kerugian kepada individu, menciptakan ketidaksetaraan dalam distribusi kapital budaya. Bourdieu juga menyoroti peran penting sekolah sebagai agen reproduksi sosial. Sistem pendidikan di Indonesia mungkin memainkan peran dalam mempertahankan struktur sosial yang ada, dengan memberikan keuntungan kepada kelompok-kelompok yang sudah memiliki kapital sosial, budaya, dan ekonomi. Selanjutnya, Bourdieu juga memperhatikan ketidakcocokan antara kurikulum sekolah dan realitas sosial siswa. Kurikulum yang tidak memperhitungkan konteks lokal dan keberagaman budaya dapat menciptakan kesenjangan dalam pembelajaran. Bourdieu juga mengamati peran media dan teknologi dalam membentuk kapital budaya dan pemahaman dunia siswa. Ketidaksetaraan akses terhadap teknologi informasi dapat menciptakan kesenjangan dalam pemahaman dan keterampilan digital.

Pemikiran Pierre Bourdieu memberikan kontribusi penting dalam memahami sistem pendidikan di Indonesia. Salah satu konsep kunci dalam pemikiran Bourdieu adalah habitus, yang merujuk pada pola-pola perilaku, pemikiran, dan preferensi yang terinternalisasi melalui pengalaman sosial. Dalam konteks pendidikan di Indonesia, konsep habitus dapat membantu dalam memahami bagaimana latar belakang sosial dan budaya siswa serta guru memengaruhi interaksi dan dinamika di lingkungan pendidikan. Selain itu, konsep modal budaya (*cultural capital*) juga relevan dalam konteks pendidikan di Indonesia. Modal budaya merujuk pada pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang dimiliki individu sebagai hasil dari pengalaman sosial dan pendidikannya. Dalam konteks Indonesia, modal budaya dapat memengaruhi akses siswa terhadap pendidikan dan kesempatannya untuk meraih kesuksesan akademis.

Pemikiran Bourdieu juga dapat membantu dalam memahami dinamika reproduksi sosial di sistem pendidikan Indonesia. Konsep reproduksi sosial mengacu pada pemeliharaan ketimpangan sosial dan struktural melalui institusi-institusi sosial, termasuk pendidikan. Di Indonesia, pemikiran ini dapat membantu dalam memahami bagaimana sistem pendidikan dapat memperkuat ketimpangan sosial, ekonomi, dan budaya yang ada dalam masyarakat. Selain itu, konsep arena (*field*) dalam pemikiran Bourdieu juga relevan dalam memahami dinamika politik, ekonomi, dan budaya dalam sistem pendidikan Indonesia. Arena pendidikan di Indonesia mencakup berbagai kepentingan, kekuasaan, dan dinamika yang memengaruhi kebijakan, kurikulum, dan praktik pendidikan (Putri, 2019).

Pemikiran Bourdieu juga dapat membantu dalam memahami bagaimana nilai-nilai, norma, dan praktik budaya memengaruhi pengalaman pendidikan siswa di Indonesia. Konsep habitus dapat membantu dalam memahami bagaimana pola-pola perilaku dan pemikiran yang terinternalisasi memengaruhi pengalaman belajar siswa. Selain itu, konsep kapital budaya (*cultural capital*) juga relevan dalam memahami bagaimana pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai yang dimiliki siswa memengaruhi kesuksesan akademis dan sosialnya di lingkungan pendidikan. Dalam konteks Indonesia, pemikiran ini dapat membantu dalam memahami bagaimana kesenjangan sosial dan ekonomi memengaruhi akses dan kesempatan pendidikan bagi siswa di berbagai latar belakang.

Selanjutnya, dalam konteks pendidikan tinggi di Indonesia, pemikiran Bourdieu juga dapat membantu dalam memahami dinamika persaingan global dan lokal dalam sistem pendidikan. Konsep kapital sosial (*social capital*) dan kapital simbolik (*symbolic capital*) dapat membantu dalam memahami bagaimana jaringan, hubungan, dan reputasi memengaruhi dinamika persaingan antar lembaga pendidikan). Selain itu, konsep arena (*field*) juga relevan dalam memahami bagaimana kebijakan, regulasi, dan dinamika politik memengaruhi perkembangan pendidikan tinggi di Indonesia. Dengan demikian, pemikiran Bourdieu memberikan kontribusi yang penting dalam memahami berbagai aspek sistem pendidikan di Indonesia.

III. PENUTUP

Pierre Bourdieu memandang bahwasanya reproduksi kekuasaan melalui kekerasan simbolik dalam sistem pendidikan memunculkan konsekuensi serius terkait ketidaksetaraan sosial. Penelitian ini menyoroti bahwa institusi pendidikan tidak hanya menjadi tempat pembelajaran, tetapi juga panggung utama bagi reproduksi kapital budaya yang ada dalam masyarakat. Proses sosialisasi dan pembentukan habitus dalam lingkungan pendidikan memainkan peran kunci dalam memelihara norma dan nilai yang menguntungkan kelompok berkapital budaya tinggi, sementara pada saat yang sama mengecualikan dan merugikan kelompok yang lain. Hasil penelitian ini memperkuat pentingnya perubahan sistemik dalam pendidikan untuk mencapai inklusivitas dan keadilan sosial. Langkah-langkah reformasi yang mendalam diperlukan untuk mengatasi pola reproduksi kekuasaan ini, termasuk diversifikasi

kurikulum, peningkatan aksesibilitas pendidikan, dan pemahaman yang lebih baik terhadap variasi kapital budaya yang dimiliki oleh peserta didik. Dengan demikian, pendidikan bukan hanya tentang transfer pengetahuan, tetapi juga merupakan arena pertarungan simbolik di mana kekuasaan dipertahankan dan direproduksi. Perubahan pendidikan yang substansial dan inklusif perlu diimplementasikan untuk mengatasi tantangan reproduksi kekuasaan melalui kekerasan simbolik dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara

DAFTAR PUSTAKA

- Apriyansyah, D. (2021). Kekerasan Simbolik dalam Praktek Pendidikan Agama Islam. *Jurnal Mubtadiin*, 7(1), 159–174.
- Fitriana, H. (2020). Kekerasan Simbolik dalam Pendidikan Islam Jenjang Ibtidaiyah di Indonesia. *Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 10(2), 87–102.
- Freire, P. (1984). *Pendidikan Sebagai Praktek Pembebasan*. Diterjemahkan oleh Alois A. Nugroho. Jakarta: PT Gramedia.
- Harisuddin, A. (1981). Teori-Teori Pendidikan Pembebasan Paulo Freire. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Mansyur, M. H. (2014). Pendidikan Ala “Paulo Freire” Sebuah Renungan. *Jurnal Ilmiah Solusi*, 1(1), 64–76.
- Martono, N. (2012). *Kekerasan Simbolik di Sekolah: Sebuah Ide Sosiologi Pendidikan Pierre Bourdieu*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Putri, R. O. (2018a). Praktek Kekerasan Simbolik (Relasi Guru dan Peserta didik dalam Pendidikan Islam). *Milah: Jurnal Studi Agama*, 17(2), 319–336.
- Putri, R. O. (2018b). Praktek Kekerasan Simbolik (Relasi Guru dan Peserta didik dalam Pendidikan Islam). *Milah: Jurnal Studi Agama*, 17(2), 319–336.
- Putri, R. O. (2019). Kekerasan Simbolik (Studi Relasi Pendidik dan Peserta Didik). *Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 05(1).
- Retnosari, P. (2019). Kekerasan Simbolik pada Sistem Pendidikan Sekolah Negeri di Indonesia. *Jurnal Widyaloka IKIP Widya Darma*, 6(3), 414–431.
- Rosmawati, T., Samsaifil, & Wally, I. H. (2021). Kekerasan Simbolik Verbal pada Lingkungan Pendidikan di SMP Negeri 3 Baubau. *JEC (Jurnal Edukasi Cendekia)*, 5(1), 9–16.
- Siswadi, G. A. (2022a). Pemikiran Filosofis Paulo Freire Terhadap Persoalan Pendidikan dan Relevansinya dengan Sistem Merdeka Belajar di Indonesia. *Guna Widya: Jurnal Pendidikan Hindu*, 9(2), 142–153.
- Siswadi, G. A. (2022b). Pendidikan yang Membebaskan dalam Pandangan Ivan Illich: Suatu Kritik Terhadap Sistem Dehumanisasi dalam Pendidikan. *Sang Acharya: Jurnal Profesi Guru*.

- Siswadi, G. A. (2022c). *Perempuan Merdeka dalam Perspektif Feminisme Eksistensialis Simone de Beauvoir*. *Jurnal Penalaran dan Riset (Journal of Reasoning Research)*, 1 (01), 58-69.
- Siswadi, G. A. (2022d). Relasi Pendidik dengan Peserta Didik dalam Pandangan Paulo Freire (1921-1997) (Suatu Telaah Filosofis sebagai Upaya Menghindari Praktik Kekerasan Simbolik dalam Dunia Pendidikan). *Sang Acharya: Jurnal Profesi Guru*, 3(1), 86–100.
- Siswadi, G. A. (2023). *Merayakan Kemerdekaan dalam Belajar*. Badung: Nilacakra.
- Taufik, P., & Ishak, C. (2017). Kekerasan Simbolik di SMA Negeri 1 Bua Ponrang Kabupaten Luwu. *Jurnal Sosial Pendidikan Sosiologi-FIS UNM*, 106–115.
- Widyastuti, N. (2020). Praktik Kekerasan Simbolik dalam Pembelajaran Jarak Jauh. *Societas: Jurnal Ilmu Administrasi & Sosial*, 9(1), 2354–7693.
- Yuliantoro, M. N. (2016). *Ilmu dan Kapital: Sosiologi Ilmu Pengetahuan Pierre Bourdieu*. Yogyakarta: Kanisius.